

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN GENDER

Prof. Dr. Diana Haiti S.H., M.H.* Prof. Dr. Fatimah, M.Hum*
*Pusat Studi Gender, Universitas Lambung Mangkurat
Email; koresponder: Diana.haiti@ulm.ac.id

LATAR BELAKANG

- Kondisi Pembangunan Gender di Indonesia dan Kalimantan Selatan menunjukkan indeks Pembangunan Gender di Kalimantan Selatan berada di bawah Indeks Pembangunan Gender Nasional
- IPG di Kalimantan Selatan tahun 2021, indeks tertinggi adalah Hulu Sungai Tengah (96,46), Banjarmasin (93,69), Banjar Baru (92,56), Balangan (92,33), dan Hulu Sungai Utara (91,74). Indeks IPG di lima (5) daerah itu malah lebih tinggi ketimbang IPG Nasional dan Provinsi. Peringkat IPG berikut disusul oleh Banjar (91,00), Hulu Sungai Selatan (89,65), Barito Kuala (89,18), Tanah Laut (86,86), Tabalong (85,48), Tanah Bumbu (85,09), Kota Baru (84,77), dan yang paling rendah (84,15).
- Sementara IPG di Kalimantan Selatan tahun 2022, indeks tertinggi adalah Hulu Sungai Tengah (96,51), Banjarmasin (93,76), Banjar Baru (92,83), Balangan (93,10), dan Hulu Sungai Utara (92,01, dan Banjar (92,12). Indeks IPG di enam (6) daerah itu malah lebih tinggi ketimbang IPG Nasional dan Provinsi. Peringkat IPG berikut disusul oleh Hulu Sungai Selatan (90,05), Barito Kuala (89,93), Tanah Laut (87,28), Tabalong (86,06), Tanah Bumbu (85,31), Kota Baru (84,93), dan yang paling rendah (84,37). IPG di Kalimantan Selatan dari tahun 2021-2022 menunjukkan peningkatan di seluruh daerah kota dan kabupaten, bahkan semula 5 (lima) daerah dengan IPG di atas indeks nasional dan provinsi, meningkat menjadi 6 (enam) daerah.
- Berdasarkan argumentasi-argumentasi perspektif kesetaraan gender dan kewarganegaraan, khususnya kewarganegaraan gender (gender citizenship), maka menjadi menarik ketika menelaah Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Selatan, karena masih terdapat 9 (sembilan) daerah yang berada di bawah Indeks Pemberdayaan Gender baik di tingkat nasional maupun provinsi, khususnya indeks yang paling rendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan politik oleh Stek holders yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikaji dengan teori. Lokasi penelitian untuk memperoleh data Primer di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan lingkungan Pemukiman Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan Stek holders di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan tahun 2023. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kesempatan ini peneliti terlebih dahulu mengemukakan indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan informan yang dijumpai di Lapangan sebagai berikut Ibu.S merupakan Kasubag KPU perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini sudah mengantongi gelar sarjana (S1) Universitas Lambung Mangkurat, saat ini informan bekerja sebagai Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan HUMAS. Menurut informan PKPU 10 tentang keterwakilan perempuan sebelumnya pembulatan kebawah tidak jadi masalah, sekarang harus mencapai 30% yang sebelumnya hanya 25% sekarang harus memenuhi syarat yaitu 30%. Hingga saat ini ada 2 partai yang masih belum memenuhi minimal keterwakilan perempuan dalam mencalonkan anggota legislatif, yaitu : Partai Buruh dan Partai Garuda. Informan menambahkan, pemenuhan keterwakilan perempuan dapat dilaksanakan saat pencermatan DCT (Daftar Calon Tetap) nanti akan ada kesempatan untuk parpol untuk merubah susunan atau menambah calonnya yang perempuan. Perubahan PKPU tentang pencalonan memang belum terbit, namun akan segera terbit dalam waktu dekat. Informan mengatakan peran perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap politik menjadi unsur utama. Karena perempuan lebih punya banyak andil besar dalam politik karna berkebutuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

REKAPITULASI PERSENTASI PEREMPUAN DI DAFTAR CALON SEMENTARA
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	(4/11) (36.36%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
4	Partai Golongan Karya	(4/11) (36.36%)	(4/8) (50%)	(5/11) (45.45%)
5	Partai NasDem	(4/11) (36.36%)	(2/8) (25%)	(4/11) (36.36%)
6	Partai Buruh	(1/4) (25%)	(1/3) (33.33%)	(1/1) (100%)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	(3/8) (37.5%)	(3/7) (42.86%)	(2/3) (66.67%)
8	Partai Keadilan Sejahtera	(4/11) (36.36%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
9	Partai Hati Nurani Rakyat	(1/1) (100%)	-	-
10	Partai Garda Republik Indonesia	(0/1) (0%)	(1/2) (50%)	(1/1) (100%)
11	Partai Amanat Nasional	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(5/11) (45.45%)
12	Partai Bulan Bintang	-	(1/3) (33.33%)	(1/3) (33.33%)
13	Partai Demokrat	(3/7) (42.86%)	(2/4) (50%)	(6/9) (66.67%)
14	Partai Persatuan Pembangunan	(3/9) (33.33%)	(2/5) (40%)	(3/9) (33.33%)
15	Partai Ummat	(1/3) (33.33%)	-	-
TOTAL JUMLAH				

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan didapat Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan karena kesadaran untuk mengembangkan masyarakat khususnya kaum perempuan, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. Pemberdayaan berarti berpindah dari posisi ketidakberdayaan yang dipaksakan ke posisi kekuasaan. Itu akan mempromosikan kekuatan perempuan yang melekat dan citra diri yang positif harus adanya prinsip utama dalam mengembangkan

konsep pemberdayaan perempuan. Informan menyatakan bahwa pemahaman indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan ini dapat terlihat dari hambatan yang terjadi pada masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pelaksanaan politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikarenakan masyarakat marginal yang masih kurang memahami tentang pentingnya politik bagi mereka, hal ini terlihat dalam beberapa wawancara yang peneliti lakukan. Secara garis besar dapat disimpulkan Pemahaman Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan secara legalitas terpenuhi tetapi dalam pelaksanaan belum terpenuhi 30% karena seleksi alam dan tantangan besar saat ini adalah setiap perempuan yang terlalu vocal untuk urusan politik banyak di pengaruhi faktor kultur budaya masyarakat setempat. Sedangkan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri politik tak jarang bersinggungan langsung dan tidak merata kadang hal demikian diatur oleh suatu organisasi atau dikuasai oleh laki-laki.

LUARAN

- Sumbit artikel ilmiah di jurnal internasional (Q4)
- Video kegiatan
- Xbanner